





sebanyak 1041 rumah tangga yang sudah menyadari bahwa lingkungan mereka tinggal memiliki risiko atau bahkan sudah pernah terdampak bencana banjir. Kemudian sebanyak 394 keluarga merasa terancam oleh bencana gempa, mengingat gempa memang sudah beberapa kali terasa dengan beberapa kekuatan yang berbeda. Selanjutnya dari 4957 KK, sebanyak 332 keluarga merasa terancam oleh bencana tsunami. Sebanyak 326 keluarga menilai bahwa potensi longsor sebagai ancaman yang tinggi atau berpotensi untuk terjadi. Dan sebanyak 67 keluarga lainnya menilai angin puting beliung sebagai potensi bencana di lingkungan tinggal mereka.

Berkaca dari data tersebut, lebih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa bencana hidrometeorologi merupakan ancaman yang berpotensi tinggi untuk terjadi di desa mereka. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan ancaman bencana tergolong masih rendah. Oleh karena itu, hal ini juga didukung dengan adanya beberapa temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa selain masyarakat belum bisa mengkategorikan potensi ancaman bencana yang ada, masyarakat juga masih memiliki kesadaran naif. Dimana masyarakat masih melakukan praktik-praktik yang dilarang dan menambah tingkat kerentanan mereka.

Hal ini dapat dilihat dari pola hidup masyarakat desa Tasikmadu yang belum menjadikan bencana sebagai ancaman. Dimana masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan pengurangan risiko bencana di kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa Tasikmadu juga masih banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.









keputusan tentang anggaran desa yang di gunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan pengalokasian dana untuk membuat program desa wisata yang lebih condong kearah sektor perekonomian. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya banjir dan tanah longsor sudah ada. Misalnya dengan membangun sistem pengairan disepanjang jalan desa yang merupakan daerah aliran sungai (DAS). Namun, hal ini memang belum maksimal dikarenakan luasnya wilayah desa Tasikmadu dan tingginya kepadatan penduduk yang menyebabkan tidak tertatanya pemukiman warga. Hal ini juga mempengaruhi system pengairan dan tata ruang desa yang kurang baik.

Tata kelola wilayah Desa Tasikmadu selama ini masih belum didasari dengan analisis kebencanaan, ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan terdahulu yang membuat pembangunan tidak dirancang dengan maksimal. Serta ketidakmampuan untuk mengubah pola pemukiman maupun drainase yang terintegrasi. Sehingga membuat kerentanan masyarakat menjadi semakin tinggi. Areal pemukiman yang tidak berpola dan saling berdempetan seperti pemukiman di perkotaan menjadi ciri khas dari pola pemukiman di desa ini.

Jika dirunut kembali pada faktor geografis, Desa tasikmadu memang merupakan areal yang cukup strategis untuk menjadi langganan bencana hidrometeorologi. Karena desa ini juga memiliki banyak cabang-cabang sungai besar yang merupakan aliran langsung dari pegunungan. Sehingga debit sungai dan volume air sendiri tidak dapat dipastikan dengan akurat secara realtime. Pada hari-hari biasa, volume air sangat sedikit, bahkan terlihat kering dan seperti sungai mati. Namun, begitu hujan, volume air akan sangat banyak dan debitnya sangat

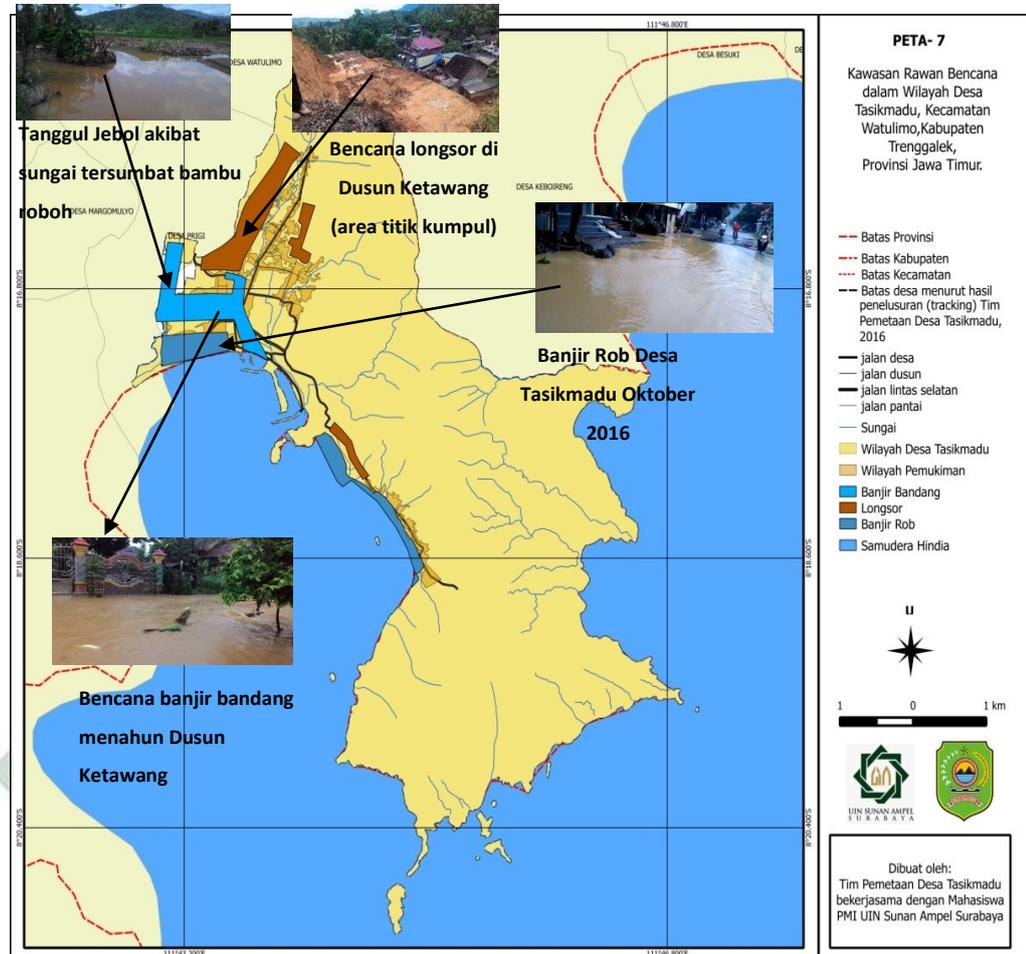






Gambar 5.9

## Kawasan Rawan Bencana Desa Tasikmadu



Sumber: Peta; Hasil Pemetaan Wilayah Desa Tasikmadu November 2016, Foto; Dokumentasi

*Pribadi Peneliti*

Semakin banyak jumlah penduduk juga membuat lahan semakin berkurang. Bahkan saat ini sudah banyak sekali bangunan-bangunan baru yang difungsikan sebagai tempat penginapan (kost) bagi pekerja “boro” dari berbagai daerah. Oleh karena itu, perencanaan manipulasi pembangunan sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi ini.

Selain itu, tingkat kerentanan masyarakat juga dipengaruhi oleh tingginya







Dengan melihat kondisi ini, masyarakat Desa tasikmadu memiliki kesempatan untuk bangkit dari bencana dengan adanya beberapa modal aset dan modal sosial yang berlaku di masyarakat. Namun, meski modal ini ada, bukan berarti kemudian masyarakat dapat dianggap sebagai masyarakat tangguh tanpa adanya kesiapan dari seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi dan melakukan tindakan pengurangan risiko bencana. Asset ini kemudian harus dilihat dengan potensi kebencanaan yang ada, sehingga dapat mengurangi kerentanan yang ada. Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, kondisi masyarakat yang belum mampu menganalisa kebencanaan merupakan faktor utama yang menjadikan tingkat kerentanan masyarakat ini tinggi.

Pentingnya sebuah peraturan desa bagi masyarakat adalah untuk membuat sebuah sistem yang mampu mengatur dan mengelola kebersihan lingkungan yang secara langsung bersinggungan dengan banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya aspek kesehatan dan ekonomi.

Selain itu, dengan adanya sebuah peraturan desa, akan mampu membuat program jangka panjang agar desa mampu mengelola dan mereduksi sampah rumah tangga dan membuat sistem drainase yang lebih baik. Selama ini, sampah yang dibuang di sungai terbawa arus hingga menjadi polutan ekosistem laut. Sampah-sampah tersebut jika terus-menerus bertambah akan semakin menumpuk dan mencemari laut. Dampak dari pencemaran ini tentu saja akan berimbas pada kehidupan masyarakat Desa itu sendiri. karena otomatis populasi ikan dan biota laut lainnya akan berkurang akibat pencemaran ini.



Serta adanya pelibatan secara partisipatif terhadap beberapa elemen dalam lembaga masyarakat dan swasta akan memberikan dampak yang lebih berarti dalam upaya-upaya pembangunan ini. Implikasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada kemudian menjadi fokus tersendiri dalam faktoryang mempengaruhi kerentanan masyarakat.

### **C. Belum Efektifnya Kelompok Yang Dibentuk Untuk PRB**

Factor selanjutnya yakni factor kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud disini adalah belum efektifnya kelompok yang sudah dibentuk oleh BPBD pada tahun 2012 saat dilangsungkannya acara simulasi bencana tsunami. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keberlanjutan pendampingan terhadap kelompok pasca simulasi oleh pihak terkait. Sehingga terkesan terjadi pembiaran terhadap kelompok dan sekedar dibentuk untuk acara simulasi tsunami saja. Ditambah lagi, dengan tidak adanya inisiasi dari pihak internal kelompok bentukan tersebut untuk menghidupkan kembali kelompoknya. Karena, sesuai dengan prioritas masyarakat yang belum menganggap bahwa bencana hidrometeorologi merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan mereka. Peran kelompok dalam pengurangan risiko bencana hidrometeorologi sangat vital. Karena bukan hanya sebagai media partisipasi masyarakat untuk melakukan organisasi, namun menjadi lebih seperti gerakan sosial untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor berbasis masyarakat secara terstruktur, tersistem, terintegrasi, massif dan berkelanjutan.

Keberadaan kelompok yang dibentuk hanya ketika simulasi bencana tsunami, membuat pemilihan menjadi tidak selektif dan didasarkan pada

keinginan bersama. Terlebih lagi kelompok hanya merupakan sebuah kebutuhan sesaat dan dibentuk atas dasar keterpaksaan saja. Masyarakat kemudian tidak memiliki pemahaman bahwa kelompok merupakan salah satu kebutuhan dalam segala aspek dalam menentukan kebijakan dimasa yang mendatang.

Masalah SDM dan factor kelembagaan memang menjadi aspek sosial yang paling disoroti. Namun, peran pemangku kebijakan atau pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan jajarannya juga tidak kalah penting dan sentral. Perspektif pemangku kebijakan dalam memandang isu kebencanaan di desa memang bukan menjadi isu utama dalam pekerjaan di birokrasi. Terbukti belum adanya program-program pemerintah desa dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Serta peraturan yang mengatur agar masyarakat desa cenderung melakukan langkah preventif.

Sejalan dengan kegiatan simulasi mitigasi bencana tsunami pada 2012 lalu, dibentuk lah sebuah kelompok bencana yang diharapkan dapat menjadi inisiator kegiatan-kegiatan terkait kebencanaan di Desa Tasikmadu. Sehingga dibentuklah sebuah kepengurusan. Namun karena pembentukan kelompok yang terkesan asal pilih dan tanpa didasari dengan pemahaman yang kuat, akhirnya kelompok ini tidak dapat berjalan sesuai harapan.

Terlebih lagi, kelompok menjadi vakum dan tinggal nama saja akibat tidak adanya upaya untuk mengumpulkan kembali dan melakukan kegiatan bersama. Ditambah lagi masyarakat yang merasa kelompok belum terlalu penting akibat belum sadarnya tentang ancaman bencana baik tsunami maupun bencana hidrometeorologi. Maka diperlukan sebuah upaya untuk mengumpulkan kembali





